



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAH
BERBASIS ELEKTRONIK KOTA BANDUNG**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Anastasia Belinda

2017310095

BANDUNG

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAH
BERBASIS ELEKTRONIK KOTA BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Anastasia Belinda

2017310095

Pembimbing

Tutik Rachmawati, Ph.D

BANDUNG

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Anastasia Belinda
NPM : 2017310095
Judul : Analisis Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung.

Telah diuji dalam Ujian Jenjang Sarjana
Pada Kamis, 28 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota:

Trisno Sakti Herwanto, S.IP, MPA :

Sekretaris

Tutik Rachmawati, Ph.D :

Anggota

Hubertus Hasan Ismail, Drs, M.Si :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Belinda

NPM : 2017310095

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Januari 2021



Anastasia Belinda

ABSTRAK

Nama : Anastasia Belinda

NPM : 2017310095

Judul : Analisis Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bandung. Tata kelola yang digunakan ada 3 komponen yaitu tata kelola sumberdaya (*resources governance*) oleh Yu che-chen, tata kelola privasi dan keamanan (*privacy and security governance*) oleh Marc Holzer dan Sae Tae Kim dan tata kelola pengembangan kapasitas (*capacity building governance*) oleh Svenja Falk dan Andrea Rommele serta Xun Wu dan Jingwei He.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang aplikasi SPBE. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada seluruh bagian pengelola dan pengguna aplikasi SPBE, observasi peneliti terkait aplikasinya, dan studi dokumen berupa panduan pengelolaan pada masing-masing aplikasi SPBE Kota Bandung. Analisis yang dilakukan adalah dengan cara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci mengenai objek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola SPBE di Kota Bandung masih belum optimal. Tidak optimalnya tata kelola dikarenakan oleh tata kelola sumberdaya (*resources governance*) dan tata kelola pengembangan kapasitas (*capacity building governance*). Di dalam tata kelola sumberdaya. Di dalam tata kelola sumberdaya yang masih belum optimal terdapat 2 indikator yaitu aksesibilitas informasi dan integrasi sistem aplikasi. Sedangkan tata kelola pengembangan kapasitas terdapat 1 indikator yang belum optimal yaitu transformasi proses. Saran yang diberikan oleh peneliti dalam tata kelola sumberdaya (*resources governance*) yaitu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menyampaikan informasi melalui website agar mudah diakses oleh seluruh pegawai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada tenaga IT dalam mengembangkan pengintegrasian sistem aplikasi sedangkan pada tata kelola pengembangan kapasitas (*capacity governance*) adalah melakukan transformasi proses aplikasi yaitu adanya pengembangan aplikasi agar lebih gesit dan efisien dalam pengoperasiannya serta adanya dashboard layanan mandiri.

Kata Kunci: Tata Kelola, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

ABSTRACT

Name : Anastasia Belinda

NPM : 2017310095

Title : *Analysis Of Electronic Based Government System in Bandung City*

This study aims to determine the Governance of Electronic-Based Government System (SPBE) applications in the city of Bandung. There are 3 components of governance used, namely resource governance by Yu Che-chen, privacy and security governance by Marc Holzer and Sae Tae Kim and capacity building governance by Svenja Falk and Andrea Rommele and Xun Wu and Jingwei He.

The method used in this research is a descriptive qualitative method. Researchers use this research method to obtain a complete picture of the SPBE application. Data collection methods in this study were interviews with all parts of SPBE application managers and users, observations of researchers related to the application, and document studies in the form of management guidelines for each SPBE application in Bandung City. The analysis carried out is by descriptive method to obtain a clear and detailed description of the object of research. To check the validity of the data, researchers used source triangulation techniques.

Based on the findings, this study shows that the governance of SPBE in Bandung is still not optimal. Not optimal governance is caused by resource governance and capacity building governance. In resource management. In resource governance that is still not optimal, there are 2 indicators, namely information accessibility and application system integration. Meanwhile, there is one indicator that is not optimal in capacity building governance, namely the transformation process. Suggestions given by researchers in resource governance are strengthening coordination and collaboration in delivering information through the website so that it is easily accessible to all employees and improving the quality of human resources (HR) in IT personnel in developing application system integration while in development governance capacity (capacity governance) is to transform the application process, namely the existence of application development to be more agile and efficient in operation and the existence of a self-service dashboard.

Keywords: *Governance, Electronic Based Government System (SPBE)*

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji bagi Tuhan Yesus, oleh karena kasih, anugerah dan penyertaan-Nya yang melimpah hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “**Analisis Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung**”.

Pertama-tama, peneliti berterimakasih kepada orangtua, terimakasih atas kasih dan cintanya, doa, motivasi, nasehat, dukungan spiritual dan materil yang berikan kepada peneliti selama kuliah dari semester satu sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Tutik Rachmawati selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, arahan, pengetahuan, kesabaran, nasehat yang diberikan kepada peneliti selama bimbingan setiap minggu sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Peneliti juga berterimakasih kepada diri sendiri karena mampu *survive* dengan segala kondisi di tengah pandemi Covid-19 sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1) Stichting Parahyangan Netherland yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi peneliti untuk dapat mengemban pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan jurusan Ilmu Administrasi Publik dengan *full* beasiswa di kampus sampai masa studi peneliti selesai.
- 2) Bapak Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan

- 3) Seluruh dosen Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan arahan selama perkuliahan.
- 4) Keluarga tercinta, papa dan mama, Raymond dan Axel yaitu kedua adik peneliti serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5) Terima kasih kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung yang sudah bersedia untuk menyediakan waktu dan ilmunya untuk diberikan kepada peneliti.
- 6) Terimakasih buat kekasih hati, Roni Sonitema Zega yang telah mendukung dan mendoakan peneliti sampai selesai. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang setia, memberikan dukungan, solusi dan selalu ada disetiap apapun keadaan. *You're stars in my heart.*
- 7) Terimakasih juga buat teman-teman angkatan 2017 penerima beasiswa Stichting Parahyangan Netherland yang mengisi hari-hari selama di Bandung: Karin, Cecilya, Delvi, Laura, Agnes, Martin, Beman, Blessing, Carlos, Indah, Nining, Poli, Ulis, Fidelis, Pio, Fransisco, Vita, Vinsen, Rani dan Untung.
- 8) Terima kasih buat Desti Krisna Sakti, Ninda Fauziah, Yollanda Firza dan Cecilya Widyani yang menemani hari-hari di kampus dengan banyak cerita, canda dan teman makan di sekitaran kampus.
- 9) Terima kasih buat angel, kak diana, kak tina, jasmine, kate yang sudah selalu mensupport dari segi iman untuk terus berpengharapan, beriman, mengasihi dan selalu mengandalkan Tuhan setiap apapun perjalanan hidup kita di dunia.
- 10) Terima kasih buat teman-teman gereja yaitu Zeal Bandung di Gereja Kristus di Indonesia Kota Bandung yang memberikan dukungan spiritual dan support

tentang kasih dan anugerah Tuhan selama ini kepada peneliti sampai pada penyelesaian skripsi.

- 11) Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman yang satu jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang sangat berkesan.
- 12) Terimakasih juga kepada teman-teman yang satu se perbimbingan dengan saya selama menjalani bimbingan dan juga mengerjakan bersama dan memecahkan solusi bersama jika ada suatu kendala, yaitu Lika, Aпти, Asyifa, kak Putri dan kak Ivan.
- 13) Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang terkait yang mungkin belum disebutkan satu persatu namun saya berterima kasih sebesar-besarnya yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Bandung, 08 Januari 2021

Anastasia Belinda

DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penelitian.....	12
Bab 2 Kerangka Teori.....	13
2.1 Teknologi Informasi dalam Organisasi Pemerintah.....	13
2.2 Konsep Digital Governance.....	15
2.3 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	16
2.3.1 Pengertian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	17
2.3.2 Tujuan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	18
2.4 Konsep Tata Kelola.....	19
2.4.1 Definisi Tata Kelola.....	19
2.5 Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	21
2.6 Tata Kelola Sumberdaya (Resources Governance).....	22
2.6.1 Aksesibilitas Informasi.....	22
2.6.2 Perencanaan Anggaran.....	24
2.6.3 Integrasi Sistem Aplikasi.....	27
2.7 Tata Kelola Privasi dan Keamanan (Privacy and Security Governance).....	28
2.7.1 Kebijakan Privasi.....	31
2.7.2 Autentikasi.....	31

2.7.3 Enkripsi.....	31
2.7.4 Penggunaan Cookie.....	32
2.8 Tata Kelola Pengembangan Kapasitas (Capacity Building Governance).....	33
2.8.1 Transformasi Organisasi dan Tenaga Kerja.....	35
2.8.2 Transformasi Proses.....	35
2.8.3 Program Pelatihan.....	36
2.9 Model Penelitian.....	38
Bab III Metode Penelitian	39
3.1 Rancangan Penelitian.....	39
3.2 Tipe Penelitian.....	40
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	41
3.4 Sumber Data.....	57
3.4.1 Data Primer.....	57
3.4.2 Data Sekunder.....	57
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	58
3.5.1 Wawancara.....	58
3.5.2 Studi Dokumen.....	59
3.5.3 Observasi.....	59
3.6 Analisis Data.....	59
3.6.1 Mengumpulkan Data.....	60
3.6.2 Interpretasi Data.....	60
3.6.3 Penyajian Data.....	61
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan.....	61
3.8 Tabel Panduan Pengumpulan Data.....	63

Bab IV Temuan	86
5.1 Daftar Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	86
5.2 Tata Kelola Sumberdaya (Resources Governance).....	122
4.2.1 Aksesibilitas Informasi.....	122
4.2.2 Perencanaan Anggaran.....	132
4.2.3 Integrasi Sistem Aplikasi.....	152
5.3 Tata Kelola Privasi dan Keamanan (Privacy and Security Governance)...	177
4.3.1 Kebijakan Privasi.....	177
4.3.2 Autentikasi.....	181
4.3.3 Enkripsi.....	191
4.3.4 Penggunaan Cookie.....	193
5.4 Tata Kelola Pengembangan Kapasitas (Capacity Building Governance)...	196
4.4.1 Transformasi Organisasi dan Tenaga Kerja.....	196
4.4.2 Transformasi Proses.....	215
4.4.3 Program Pelatihan.....	225
Bab V Analisis dan Pembahasan	230
5.1 Tata Kelola Sumberdaya (Resources Governance).....	230
5.1.1 Aksesibilitas Informasi.....	233
5.1.2 Perencanaan Anggaran.....	235
5.1.3 Integrasi Sistem Aplikasi.....	239
5.2 Tata Kelola Privasi dan Keamanan (Privacy and Security).....	244
5.2.1 Kebijakan Privasi.....	246
5.2.2 Autentikasi.....	247
5.2.3 Enkripsi.....	248

5.2.4 Penggunaan Cookie.....	249
5.3 Tata Kelola Pengembangan Kapasitas (Capacity Building).....	250
5.3.1 Transformasi Organisasi dan Tenaga Kerja.....	252
5.3.2 Transformasi Proses.....	255
5.3.3 Program Pelatihan.....	258
BAB VI Kesimpulan dan Saran.....	260
6.1 Kesimpulan.....	260
6.2 Saran.....	261
DAFTAR PUSTAKA.....	263
LAMPIRAN.....	267

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Domain Tata Kelola.....	4
Tabel 1.2 Perbandingan Indeks SPBE Kota Bandung Tahun 2018 dan 2019.....	5
Tabel 1.3 Nilai SPBE 2019.....	8
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	42
Tabel 3.2 Tabel Pengumpulan Data.....	64
Tabel 4.1 Daftar Aplikasi SPBE Kota Bandung.....	87
Tabel 4.2 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Aksesibilitas Informasi.....	120
Tabel 4.3 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Perencanaan Anggaran.....	129
Tabel 4.4 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Integrasi Sistem Aplikasi.....	149
Tabel 4.5 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Kebijakan Privasi.....	174
Tabel 4.6 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Autentikasi.....	179
Tabel 4.7 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Enkripsi.....	188

Tabel 4.8 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Penggunaan Cookie.....	190
Tabel 4.9 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Transformasi Organisasi dan Tenaga Kerja.....	193
Tabel 4.10 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Transformasi Proses.....	212
Tabel 4.11 Hasil Wawancara, Kuesioner dan Studi Dokumen Program Pelatihan.....	222
Tabel 5.1 Tata Kelola Sumberdaya (<i>Resources Governance</i>) SPBE Kota Bandung.....	229
Tabel 5.2 Tata Kelola Privasi dan Keamanan Aplikasi SPBE Kota Bandung.....	242
Tabel 5.3 Tata Kelola Pengembangan Kapasitas Aplikasi SPBE Kota Bandung.....	249

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Evaluasi Perbandingan Tata Kelola SPBE Tahun 2018 dan 2019.....	7
Gambar 4.1 Siklus Pengelolaan SIRA, E-Musrembang dan E-Reses.....	88
Gambar 4.2 Alur BIRMS.....	91
Gambar 4.3 Pengelolaan SILAKIP Bandung.....	96
Gambar 4.4 Indikator dan Target Tujuan dalam SILAKIP.....	97
Gambar 4.5 Program dalam Aplikasi SILAKIP.....	97
Gambar 4.6 Kegiatan dalam Aplikasi SILAKIP.....	98
Gambar 4.7 Perencanaan dalam Aplikasi SILAKIP.....	99
Gambar 4.8 Pengukuran, Capaian Kinerja dan Tabulasi dalam SILAKIP.....	99
Gambar 4.9 Pelaporan Kinerja dalam SILAKIP.....	100
Gambar 4.10 Evaluasi Kinerja dalam SILAKIP.....	100
Gambar 4.11 Tata Kelola LAPOR Kota Bandung.....	102
Gambar 4.12 Dashboard SIMPEG.....	107
Gambar 4.13 Daftar Pemohon Dengan Usul Perubahan dalam SIMPEG.....	108

Gambar 4.14 Update Data Kenaikan Pangkat Kolektif dalam SIMPEG.....	108
Gambar 4.15 Hasil Data yang Dikirimkan dalam aplikasi SIMPEG.....	108
Gambar 4.16 List Pegawai dalam SIMPEG.....	109
Gambar 4.17 Dashboard Aplikasi SIAP.....	110
Gambar 4.18 Rekap Kehadiran dalam Aplikasi SIAP.....	110
Gambar 4.19 Detail Kehadiran Pegawai dalam Aplikasi SIAP.....	111
Gambar 4.20 Izin Kehadiran Pegawai dalam Aplikasi SIAP.....	111
Gambar 4.21 Pengaturan Jam Kerja Pegawai dalam Aplikasi SIAP.....	112
Gambar 4.22 Pengaturan Jadwal Kerja dalam Aplikasi SIAP.....	112
Gambar 4.23 Aplikasi E-RK Kota Bandung.....	115
Gambar 5.1 Kemudahan mengakses informasi SPBE.....	230
Gambar 5.2 Informasi aplikasi sesuai kebutuhan kerja pegawai.....	231
Gambar 5.3 Kebutuhan informasi aplikasi.....	232
Gambar 5.4 Anggaran mengelola SPBE dari Pemerintah Daerah Kota Bandung.....	234
Gambar 5.5 Rencana anggaran.....	234
Gambar 5.6 Laporan pertanggungjawaban anggaran.....	236
Gambar 5.7 Integrasi sistem aplikasi.....	237

Gambar 5.8 Pengembangan berkelanjutan aplikasi SPBE.....	239
Gambar 5.9 Penggunaan semua menu dalam aplikasi SPBE.....	240
Gambar 5.10 Kebijakan privasi aplikasi SPBE.....	243
Gambar 5.11 Autentikasi SPBE.....	245
Gambar 5.12 Enkripsi SPBE.....	246
Gambar 5.13 Pengguna cookies.....	247
Gambar 5.14 Jumlah pengguna aplikasi SPBE.....	250
Gambar 5.15 Kolaborasi pegawai di masing-masing SKPD Kota Bandung.....	251
Gambar 5.16 Waktu yang digunakan dalam mengoperasikan dan menggunakan aplikasi SPBE.....	252
Gambar 5.17 Pengoperasian aplikasi SPBE.....	253
Gambar 5.18 Automasi SPBE Kota Bandung.....	254
Gambar 5.19 Dashboard layanan mandiri.....	255
Gambar 5.20 Program pelatihan aplikasi SPBE.....	255

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini teknologi komputer sebagai mesin utama penghasil informasi telah mencapai tingkatan yang sangat matang dan kehadiran teknologi komunikasi yang mendukung secara penuh penyampaian informasi sehingga informasi dapat diperoleh dimana saja dan kapan saja sejauh infrastruktur telekomunikasi tersedia.¹

Sebelum adanya teknologi yang canggih di Indonesia, manusia melakukan pekerjaannya dengan cara manual sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Begitu pula dengan pemerintah di Indonesia seiring berjalannya waktu, penggunaan teknologi informasi semakin meningkat di berbagai daerah maupun pusat. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan dikenal dengan istilah *e-government*.

Menurut World Bank, e-government adalah:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services

¹ Kodrat Iman Satoto, 2008, *Penerapan Teknologi Informasi untuk Pemerintah Daerah: Universitas Diponegoro*, halaman 185 diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/277106576_PENERAPAN_TEKNOLOGI_INFORMASI_UNTUK_PEMERINTAH_DAERAH pada tanggal 25 April 2020 pukul 14.32

to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reduction”²

Kemudian, menurut United Nation menyatakan bahwa e-government adalah:

“E-government is defined as utilizing the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to citizens”³

Dari kedua definisi diatas, oleh karena nya peneliti menyimpulkan bahwa *e-Government* merupakan salah satu bentuk aplikasi yang digunakan dan dimanfaatkan pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan informasi kepada publik ataupun mengelola instansi nya masing-masing agar dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi.

Salah satu pemerintah daerah yang semakin maju dan berkembang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi atau *e-Government* adalah Kota Bandung. Kota Bandung adalah ibukota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung saat ini telah menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan satu bentuk dari *e-Government* berdasarkan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dimana hal ini dilaksanakan sebagai bentuk reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya Kota Bandung agar lebih efektif dan efisien.

² World Bank dalam Shailendra dan Susil, *E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and status around the world* diakses melalui http://iceg.net/2007/books/1/1_369.pdf pada tanggal 25 April pukul 15.48

³ *Ibid*

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.⁴ Didalam pelaksanaan SPBE ini, terdapat 3 tujuan diantaranya adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- 3) Mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang terpadu

Berdasarkan salah satu tujuan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel⁵, Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.⁶ Sehingga **penelitian ini akan membahas secara detail dengan mengidentifikasi dan menganalisis Tata Kelola *Digital Government* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung yaitu Bagian Internal dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terdiri dari 20 aplikasi di 8 sektor.**

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bandung telah dilaksanakan evaluasi sebanyak 2 kali yakni di tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem

⁴ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat struktur penilaian pada pelaksanaan SPBE, diantaranya:⁷

- 1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang akan dinilai
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang akan dinilai; dan
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Maka, struktur penilaian pada domain Tata Kelola SPBE sendiri yaitu, sebagai berikut.

Domain Tata Kelola SPBE		
No.	Aspek	Indikator
1.	Kelembagaan	a. Tim pengarah SPBE Instansi Pemerintah b. Inovasi proses bisnis terintegrasi
2.	Strategi dan Perencanaan	a. Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah b. Anggaran dan Belanja TIK
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Pengoperasian pusat data b. Integrasi sistem aplikasi c. Penggunaan aplikasi berbagi pakai

Tabel. 1.1 Domain Tata Kelola SPBE

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menurut peneliti, saat ini **Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kota Bandung belum optimal**. Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik masih belum optimal karena Pemerintah Kota Bandung telah melakukan evaluasi terhadap SPBE yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sendiri. Hasil evaluasi tersebut tergambar pada tabel berikut. Hasil evaluasi ini

⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

menjadi alasan ilmiah dan lokus penelitian. Diperlukan sebuah bukti ilmiah sebagai dasar untuk memperbaiki sistem pengelolaan SPBE Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti ilmiah tersebut. Dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menyediakan bukti ilmiah tersebut sehingga dapat digunakan, dimanfaatkan dengan baik untuk pengelolaan aplikasi SPBE tersebut oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berikut hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1.2 Perbandingan Indeks SPBE Kota Bandung pada tahun 2018 dan 2019

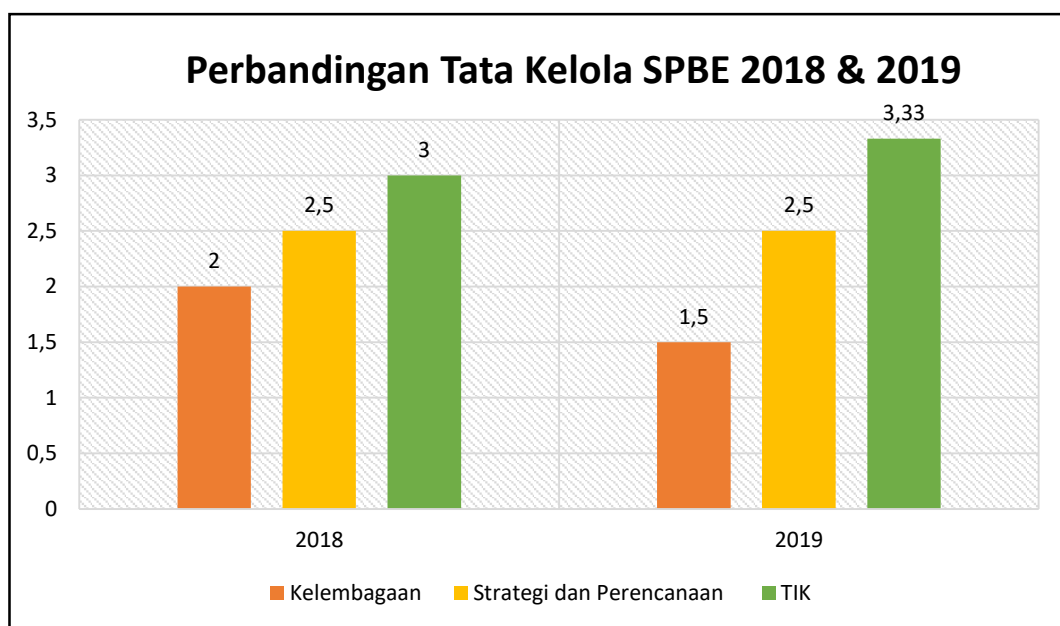
Nilai Tahun	Pemerintah Kota Bandung	
	2018	2019
Indeks SPBE	3,11	3,72
Predikat SPBE	Baik	Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	3,00	3,06
1. Kebijakan Tata Kelola SPBE	2,86	2,57
2. Kebijakan Layanan SPBE	3,1	3,4
Domain Tata Kelola SPBE	2,57	2,57
1. Kelembagaan	2	1,5
2. Strategi Perencanaan	2,5	2,5
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	3,33
Domain Layanan SPBE	3,42	4,52
1. Administrasi Pemerintah	3,57	4,71
2. Pelayanan Publik	3,17	3,17

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung tentang perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dan 2019 pada tanggal 19 Februari 2020.

Seperti yang terlihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2018 domain Tata Kelola tidak ada perubahan nilai pada tahun 2019, walaupun secara keseluruhan indeks penilaian SPBE nya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Pada aspek kelembagaan mengalami penurunan sebesar 0,5 kemudian pada aspek strategi dan perencanaan tidak ada perubahan nilai sama sekali dan pada aspek

teknologi informasi dan komunikasi terjadi peningkatan sebesar 0,33. Menurut peneliti, tata kelola sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) ini perlu dibenahi karena jika ditotalkan keseluruhan aspek yang meningkat dan menurun, yaitu *lebih besar penurunannya dengan skala 0,5 dibandingkan peningkatannya yaitu 0,33*.

Berikut peneliti membuat tabel skala peningkatan dan penurunan yang terjadi pada struktur penilaian Tata Kelola SPBE berdasarkan Kemenpan-RB.



Gambar 1.1 Grafik Gambaran Hasil Evaluasi Perbandingan Tata Kelola SPBE Tahun 2018 dan 2019

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung (G) menyatakan bahwa “kondisi tata kelola SPBE pada beberapa aplikasi elektronik belum dapat berjalan optimal dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu mendukung proses tata kelola data sesuai regulasi SPBE, belum diterapkan dan dipatuhinya kebijakan tata kelola data, serta belum tersedianya sistem yang mampu mendukung

proses tata kelola.⁸ Ia juga menyatakan bahwa “rencana induk SPBE belum dibuat oleh pemerintah pusat, masih dalam proses peta jalan. Bagian inovasi terintegrasi masih kecil karena prosesnya yang terlalu ribet/lama, contohnya layanan perizinan sehingga berdampak pada sustainability yang tidak efektif dan efisien”⁹.

Kemudian, data sekunder yang didapat peneliti yaitu menurut F, selaku koordinator tim Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang berupaya untuk mendorong adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan, secara khusus di Kota Bandung melalui pemanfaatan data terbuka (*open data*).¹⁰ Namun, ***salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah terkait tata kelola data.***¹¹

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bukan hanya sudah dievaluasi dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung tetapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Seperti pada data tabel berikut terkait hasil evaluasi nilai indeks SPBE tahun 2019 dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya-

⁸ Wawancara staf Dinas Komunikasi dan Informasi bagian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kota Bandung pada tanggal 03 Februari 2020 di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung

⁹ Wawancara staf Dinas Komunikasi dan Informasi bagian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kota Bandung pada tanggal 03 Februari 2020 di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung

¹⁰ Diskominfo Kota Bandung Kunjungan Belajar ke IDEA, 2019 diakses melalui <http://perkumpulanidea.or.id/diskominfo-kota-bandung-kunjungan-belajar-ke-idea/> pada tanggal 09 Februari 13.09

¹¹ *Ibid*

Tabel 1.3 Nilai SPBE 2019

Nama Instansi	Kementerian Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
K/L/D	Kementerian	Lembaga lainnya	Kota	Kota	Provinsi
Daerah	Pusat	Pusat	Daerah	Daerah	Daerah
Indeks SPBE	4,39	3,81	3,72	3,72	3,12
Predikat SPBE	Memuaskan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik
Domain Kebijakan SPBE	4,82	3,53	3,06	2,88	2,76
Kebijakan Tata Kelola SPBE	5,00	3,86	2,57	2,29	3,29
Kebijakan Layanan SPBE	4,7	3,3	3,4	3,3	2,4
Domain Tata Kelola	3,57	4,14	2,57	2,86	3,14
Kelembagaan	5,00	4,00	1,5	2,5	3,00
Strategi dan Perencanaan	3,00	4,5	2,5	2,00	3,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00	4,00	3,33	3,67	3,00
Domain Layanan SPBE	4,67	3,73	4,52	4,42	3,21
Administrasi Pemerintahan	4,57	3,57	4,71	4,57	3,14
Pelayanan Publik	4,83	4,00	4,17	4,17	3,33

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung tentang hasil evaluasi

SPBE Tahun 2019 pada tanggal 19 Februari 2020

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan baru yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas digital di bidang di bidang pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan memudahkan segala proses yang berbelit menjadi lebih efektif dan efisien. Suatu kebijakan yang dijalankan tentu harus melewati berbagai proses mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Tahapan yang telah berjalan harusnya melalui tata kelola yang baik dari pihak internal pemerintah agar tujuannya sesuai harapan dan berjalan dengan optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis/konseptual yang dijelaskan pada bab 2 untuk menilai atau mengevaluasi Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pemahaman alternatif selain pendekatan normatif dalam menilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung karena mereka mendapat masukan dari perspektif akademis.

Berdasarkan data, informasi dan fakta yang diperoleh dan diuraikan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan bahwa Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung yang telah dievaluasi selama 2 tahun, belum optimal. Oleh karenanya, penelitian ini secara khusus membahas:
Bagaimana Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan berupa bukti empiris mengenai konsep administrasi publik yang dipelajari dalam mata kuliah Governansi Digital dan wawasan terkait Tata Kelola *Digital Government* yang baik, khususnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Selain itu, dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Governansi Digital dan sebagai bahan rujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mengukur Tata Kelola *Digital Government* yang baik pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik, masukan, saran dan perbaikan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam memaksimalkan dan meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ditahun yang akan datang.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut gambaran secara keseluruhan rancangan penelitian yang akan dibagi atas tiga bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Bab I fokus pada pertanyaan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Hal tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II: Kerangka Teori

Bab II merupakan jawaban teoritis dari pertanyaan penelitian di bab satu yang berupa landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Hal ini terkait teori Tata Kelola Digital Government.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III menjelaskan tentang cara yang dilakukan pada penelitian secara empirik. Hal itu terdiri dari rancangan penelitian, tipe penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan operasionalisasi variabel.

Bab IV: Temuan

Bab IV merupakan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dari narasumber atau responden berupa hasil wawancara, kuesioner, observasi dan studi dokumen.

Bab V: Analisis dan Pembahasan

Bab V adalah jawaban empirik dari pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang diberikan dalam bab II.

Bab VI: Penutup

Bab VI adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.